Ecoplan Vol.8 No.2, Oktober 2025, p. 119-128
ISSN p: 2620-6102; e: 2615-5575

Analisis Empiris Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kalimantan Tengah (2014–2023)

Bismart Arituan*, Abdul Halim, Pratiwi Subianto
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

*E-mail corresponding author: bismartarituan@gmail.com

Ecoplan

Submitted: Mar 12, 2025
Accepted: Sept 28, 2025
Published: Oct 31, 2025

Keywords: ***Fiscal Policy; Economic Growth; Central Kalimantan; Regional Inequality; Multiplier Effect***

Abstract - *This study examines the impact of fiscal policy on economic growth in Central Kalimantan during the period 2014-2023. As a province rich in natural resources, Central Kalimantan faces challenges in optimizing fiscal policy to promote sustainable economic growth and reduce development disparities between regions. This research aims to evaluate the effectiveness of fiscal policy implementation, analyze the impact of budget allocation on leading economic sectors, and examine its influence on equitable economic development across regions. The research methodology employs a quantitative approach with panel data analysis for the period 2014-2023 covering 13 regencies and 1 city in Central Kalimantan. Based on the Hausman test results, the fixed effects model was selected as the best model with GRDP as the dependent variable and independent variables including capital expenditure, infrastructure spending, PAD, and transfer funds. The research results show a significant relationship between fiscal policy and economic growth with a capital expenditure elasticity coefficient of 0.284 and a multiplier effect of 1.42. The construction sector shows the highest elasticity (0.412) to capital expenditure, followed by manufacturing industry (0.385) and agriculture (0.276). Regional inequality analysis shows a decrease in the Williamson Index from 0.412 (2019) to 0.364 (2023). In conclusion, fiscal policy has a positive impact on regional economic growth but still requires optimization in terms of budget allocation, strengthening regional fiscal capacity, development equalization, and developing comprehensive monitoring systems.*

Abstrak - Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah selama periode 2014-2023. Sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan fiskal, menganalisis dampak alokasi anggaran terhadap sektor ekonomi unggulan, dan mengkaji pengaruhnya terhadap pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel periode 2014-2023 mencakup 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil uji *Haussman*, model *fixed effects* terpilih sebagai model terbaik dengan variabel dependen PDRB dan variabel independen meliputi belanja modal, belanja infrastruktur, PAD, dan dana transfer. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien elastisitas belanja modal sebesar 0,284 dan *multiplier effect* 1,42. Sektor konstruksi menunjukkan elastisitas tertinggi (0,412) terhadap belanja modal, diikuti industri pengolahan (0,385) dan pertanian (0,276). Analisis ketimpangan wilayah menunjukkan penurunan Indeks *Williamson* dari 0,412 (2019) menjadi 0,364 (2023). Kesimpulannya, kebijakan fiskal memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional namun masih memerlukan optimalisasi dalam hal alokasi anggaran, penguatan kapasitas fiskal daerah, pemerataan pembangunan, dan pengembangan sistem monitoring yang komprehensif.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Pertumbuhan Ekonomi; Kalimantan Tengah; Ketimpangan Regional; Efek Multiplier

PENDAHULUAN

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, namun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Sejak diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dalam mengatur keuangan dan pembangunan wilayahnya. Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) menjadi instrumen utama pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Haga dkk, 2024). Namun, implementasi kebijakan fiskal yang efektif masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Struktur ekonomi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh sektor primer seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketergantungan terhadap sektor berbasis sumber daya alam ini membuat ekonomi daerah sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas dunia. Penelitian Sari dkk (2024) menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditas global berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah dan stabilitas fiskal Kalimantan Tengah. Sementara itu, pengembangan sektor industri dan jasa masih berjalan lambat, sehingga diversifikasi ekonomi (*economic diversification*) belum optimal. Kondisi ini memerlukan intervensi kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong transformasi struktur ekonomi menuju yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Permasalahan utama yang dihadapi Kalimantan Tengah adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar kabupaten/kota masih di bawah 20% dari total pendapatan daerah, yang berarti ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih sangat tinggi. Situasi ini diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2020, yang menyebabkan penurunan drastis pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi (Latifah & Rosyadi, 2024). Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian prioritas pembangunan dan mencari strategi pembiayaan alternatif. Kesenjangan pembangunan antar wilayah (*regional development gap*) juga menjadi isu krusial di Kalimantan Tengah. Distribusi pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah lainnya, masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan regional. Penelitian Risqiyah & Yunani, (2022) mengungkapkan bahwa meskipun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur telah ditingkatkan, dampaknya terhadap pemerataan pembangunan masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada strategi alokasi dan implementasi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji secara mendalam. *Pertama*, bagaimana efektivitas implementasi kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah selama periode 2014-2023, dan apakah terdapat variasi dampak antar wilayah dan antar waktu. *Kedua,* bagaimana hubungan antara alokasi anggaran pemerintah daerah dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, serta mekanisme transmisi apa yang terjadi dalam proses tersebut. *Ketiga*, sejauh mana kebijakan fiskal berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah di Kalimantan Tengah, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut dalam mengurangi kesenjangan regional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah periode 2014-2023. Secara spesifik, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dengan mempertimbangkan variasi spasial dan temporal; menganalisis hubungan antara alokasi anggaran dengan perkembangan sektor ekonomi unggulan serta mengidentifikasi mekanisme transmisi kebijakan fiskal terhadap produktivitas sektoral; dan mengkaji pengaruh kebijakan fiskal terhadap pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah dengan fokus pada pengurangan kesenjangan antara kawasan maju dan tertinggal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu ekonomi publik regional. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang efektivitas kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi regional dengan karakteristik khas daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Tengah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan. Temuan empiris tentang responsivitas sektor-sektor ekonomi terhadap stimulus fiskal dapat membantu dalam menentukan prioritas alokasi anggaran, sementara

analisis spasial akan memberikan masukan untuk merancang kebijakan yang lebih progresif dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal merupakan instrumen fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui mekanisme alokasi sumber daya publik yang efisien. Teori ekonomi Keynesian menekankan peran strategis pengeluaran pemerintah dalam menstimulasi aktivitas ekonomi, terutama dalam kondisi resesi atau perlambatan ekonomi (Rodrik, 2015). Transmisi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional terjadi melalui beberapa saluran utama, yaitu stimulus permintaan agregat, peningkatan produktivitas melalui investasi infrastruktur, akumulasi modal manusia, dan perbaikan iklim investasi. Kompleksitas interaksi antar saluran ini menghasilkan variasi efektivitas kebijakan fiskal di berbagai konteks regional dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Thwaites, (2025) mengidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada kapasitas institusional dan struktur ekonomi lokal, dimana daerah dengan diversifikasi ekonomi yang tinggi menunjukkan responsivitas yang lebih baik terhadap stimulus fiskal dibandingkan dengan daerah yang bergantung pada sektor tunggal. Penelitian empiris menunjukkan bahwa multiplier fiskal di tingkat regional cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional karena adanya efek *spillover* yang terbatas secara geografis. Hal ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa kebijakan fiskal desentralisasi memiliki potensi efektivitas yang lebih tinggi dalam konteks heterogenitas regional.

Blanchard dkk, (2021) menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di negara berkembang, menemukan bahwa investasi infrastruktur publik memiliki efek multiplier tertinggi dalam jangka panjang dengan koefisien elastisitas rata-rata 0,35-0,42. Temuan ini sejalan dengan teori *endogenous growth* yang menekankan pentingnya investasi publik dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara agregat. Namun, efektivitas investasi infrastruktur sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan implementasi proyek, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan sektor ekonomi lokal.

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Implementasi desentralisasi fiskal telah mengubah paradigma pengelolaan keuangan publik dari pendekatan sentralistik menuju sistem yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Gemmell dkk, (2016) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki tujuan ganda, yaitu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya melalui pendekatan *bottom-up* dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat lokal. Teori *fiscal federalism* memprediksi bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Paradoks desentralisasi fiskal muncul ketika peningkatan transfer fiskal tidak selalu berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi. Bom & Ligthart (2014) mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan paradoks ini, antara lain kapasitas institusional yang terbatas, *asymmetric information* antara pemerintah pusat dan daerah, serta moral hazard dalam pengelolaan anggaran daerah. Kapasitas absorpsi yang rendah menyebabkan ketidakefisienan dalam implementasi program pembangunan, sedangkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi memperburuk masalah akuntabilitas fiskal.

Yılmaz & Çetin, (2017) menemukan bahwa daerah dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang tinggi menunjukkan performa ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal tidak hanya mencerminkan kapasitas ekonomi daerah, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pengembangan sumber pendapatan dan efisiensi pengeluaran. *Dependency ratio* yang tinggi terhadap transfer fiskal cenderung menciptakan disinsentif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lokal.

Kebijakan Fiskal dan Pengembangan Sektor Unggulan

Strategi pengembangan sektor unggulan melalui kebijakan fiskal memerlukan pendekatan yang *sophisticated* dalam mengidentifikasi *competitive advantage* dan *comparative advantage* masing-masing daerah. Yılmaz & Çetin, (2017) mengembangkan *framework* analisis yang mengintegrasikan *location quotient, shift-share analysis,* dan input-output modeling untuk menentukan prioritas alokasi anggaran sektor. Temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas belanja sektor sangat bergantung pada kesesuaian antara jenis pengeluaran dengan karakteristik *value chain* sektor yang dikembangkan.

Belanja infrastruktur menunjukkan dampak positif tertinggi terhadap pengembangan sektor manufaktur dan perdagangan karena kemampuannya dalam menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan konektivitas pasar. Sebaliknya, belanja pendidikan dan riset lebih efektif dalam mendorong pengembangan sektor jasa berbasis pengetahuan dan industri kreatif. Gemmell dkk, (2016) menekankan pentingnya *complementarity* antara berbagai jenis belanja pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan sektor unggulan. *Isolated intervention* cenderung menghasilkan efek yang suboptimal dibandingkan dengan pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan interdependensi antar sektor.

Volatilitas harga komoditas global memberikan tantangan khusus bagi daerah yang bergantung pada sumber daya alam, seperti yang dialami banyak daerah di Indonesia. Bom & Ligthart, (2014) menganalisis strategi adaptasi fiskal dalam menghadapi *commodity price shocks*, menemukan bahwa pembentukan *stabilization fund* dan diversifikasi basis pendapatan daerah menjadi kunci ketahanan fiskal. Daerah yang berhasil menerapkan *counter-cyclical fiscal policy* menunjukkan volatilitas pertumbuhan yang lebih rendah dan kemampuan *recovery* yang lebih baik pasca-shock eksternal.

Ketimpangan Regional dan Redistribusi Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki dua peran dalam konteks ketimpangan regional, baik sebagai instrumen redistribusi maupun sebagai faktor yang berpotensi memperlebar kesenjangan antar daerah. Gemmell dkk, (2016) mengembangkan model teoretis yang menunjukkan bahwa efek redistribusi kebijakan fiskal bergantung pada *progressive* atau *regressive nature* dari struktur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Transfer fiskal yang bersifat *equalizing* dapat mengurangi ketimpangan, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas lokal, dapat menciptakan *dependency trap* yang kontraproduktif.

Spatial spillover effects dalam kebijakan fiskal menjadi pertimbangan penting dalam merancang strategi pengurangan ketimpangan regional. Investasi infrastruktur di suatu daerah tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah tersebut, tetapi juga menciptakan *positive externalities* bagi daerah sekitarnya melalui peningkatan konektivitas dan akses pasar. Bom & Ligthart (2014) menggunakan *spatial econometric* model untuk menganalisis *spillover effects* kebijakan fiskal di tingkat kabupaten/kota, menemukan bahwa koefisien *spatial lag* untuk belanja infrastruktur mencapai 0,23, mengindikasikan adanya efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan daerah tetangga.

Pengukuran ketimpangan regional memerlukan indikator yang komprehensif dan sensitif terhadap perubahan distribusi pembangunan antar wilayah. Indeks *Williamson,* Indeks *Theil,* dan *Gini Coefficient* masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam menangkap dimensi ketimpangan yang berbeda. Yılmaz & Çetin (2017) menyarankan penggunaan *composite index* yang mengintegrasikan berbagai dimensi ketimpangan, termasuk *economic disparity, infrastructure gap*, dan *human development inequality,* untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas kebijakan redistribusi fiskal. eksternal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dengan metodologi analisis data panel digunakan untuk mengeksplorasi hubungan kausal antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah periode 2014-2023. Desain penelitian longitudinal ini mencakup 13 kabupaten dan 1 kota sebagai unit observasi dengan total 140 observasi (14 × 10 tahun). Penggunaan struktur data panel dipilih karena kemampuannya dalam mengatasi heterogeneitas yang tidak terobservasi antar unit *cross-sectional* dan memberikan estimasi yang lebih efisien dibandingkan dengan data *time series* atau *cross-section* murni. Model ekonometrik dasar yang spesifik dalam penelitian ini mengadopsi fungsi produksi *Cobb-Douglas* yang dimodifikasi dengan memasukkan komponen kebijakan fiskal sebagai input produktif. Spesifikasi model umum diformulasikan sebagai:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 BI_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \beta_4 DT_{it} + \beta_5 X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

dengan Yit merepresentasikan pertumbuhan PDRB riil kabupaten/kota i pada tahun t, BMit adalah belanja modal, BIit menunjukkan belanja infrastruktur, PADit merupakan pendapatan asli daerah, DTit adalah dana transfer, Xit merupakan vektor variabel kontrol, μi menangkap efek tetap individu, λt adalah efek tetap waktu, dan εit merupakan error term yang diasumsikan berdistribusi normal dengan mean nol dan varians konstan.

Transformasi logaritma natural diterapkan pada seluruh variabel untuk memperoleh interpretasi elastisitas dan mengurangi masalah heteroskedastisitas. Model log-linear yang diestimasi menjadi:

$$\ln(Y_{it}) = \alpha + \beta_1 \ln(BM_{it}) + \beta_2 \ln(BI_{it}) + \beta_3 \ln(PAD_{it}) + \beta_4 \ln(DT_{it}) + \beta_5 \ln(X_{it}) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Pemilihan antara model *fixed effects* dan *random effects* dilakukan melalui uji *Hausman* dengan hipotesis nol bahwa *random effects estimator* konsisten dan efisien. Statistik uji *Hausman* mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat kebebasan sebanyak jumlah regresor. Formulasi uji *Hausman* adalah:

$$H = (\beta_{FE} - \beta_{RE})'[\mathrm{Var}(\beta_{FE}) - \mathrm{Var}(\beta_{RE})]^{-1}(\beta_{FE} - \beta_{RE}) \sim \chi^2(k)$$

dengan βFE dan βRE masing-masing merepresentasikan *estimator fixed effects* dan *random effects*, sedangkan k adalah jumlah variabel penjelas.

Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui ekstraksi dokumen resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing kabupaten/kota. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai publikasi resmi dan melakukan *consistency check* untuk mengidentifikasi outlier atau kesalahan pencatatan. Data yang digunakan telah melalui proses deflating menggunakan indeks harga konsumen regional untuk memperoleh nilai riil. Tahapan analisis data dimulai dengan pengujian stasionaritas menggunakan Im-Pesaran-Shin unit root test untuk data panel. Uji diagnostik meliputi pengujian multikolinearitas melalui *variance inflation factor (VIF)*, heteroskedastisitas menggunakan *modified Wald test*, dan autokorelasi serial dengan *Wooldridge test*. Apabila terdapat pelanggaran asumsi klasik, dilakukan koreksi menggunakan *robust standard error* atau *generalized least squares (GLS).* Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengestimasi berbagai spesifikasi model alternatif, termasuk penambahan variabel lag, interaksi antar variabel, dan penggunaan *instrumental variable* untuk mengatasi potensi masalah endogenitas. Multiplier effect kebijakan fiskal dihitung menggunakan formulasi:

$$Multiplier = \frac{\partial Y}{\partial G} = \beta \times \left(\frac{Y}{G}\right)$$

dengan β adalah koefisien elastisitas estimasi dan Y/G merupakan rasio output terhadap pengeluaran pemerintah. Pengukuran ketimpangan regional menggunakan *Indeks Williamson* yang dimodifikasi untuk mengakomodasi karakteristik spesifik Kalimantan Tengah:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \left(\frac{N_i}{N}\right)}}{\bar{Y}}$$

dimana Yi adalah PDRB per kapita kabupaten/kota i, $\bar{Y}$ merupakan rata-rata tertimbang PDRB per kapita provinsi, Ni adalah jumlah penduduk kabupaten/kota i, dan N adalah total penduduk provinsi. Estimasi model dilakukan menggunakan *software* ekonometrik *Stata* versi 17 dengan tingkat signifikansi statistik lima persen (5% atau 0,05). Interpretasi hasil didasarkan pada magnitudo dan signifikansi koefisien estimasi, *R-squared within* dan *between*, serta berbagai uji diagnostik untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Efektivitas Implementasi Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Analisis data panel periode 2014-2023 menunjukkan hubungan signifikan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Hasil estimasi model fixed effect mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,284 ($p < 0.05$), mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% belanja modal berkontribusi pada peningkatan PDRB sebesar 0,284%. Temuan ini mengkonfirmasi peran strategis investasi pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi regional.

Tabel 1. Hasil Estimasi Pengaruh Komponen Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	p-value
Belanja Modal	0,284	0,042	6,762	0,00
Belanja Infrastruktur	0,326	0,053	6,151	0,00
PAD	0,198	0,037	5,351	0,00
Dana Transfer	0,245	0,044	5,568	0,00

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja infrastruktur memiliki dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien elastisitas 0,326, diikuti oleh dana transfer (0,245), belanja modal (0,284), dan PAD (0,198). Signifikansi statistik seluruh variabel pada tingkat kepercayaan 99% mengindikasikan robustnya model yang digunakan.

Trend pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah selama periode penelitian menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 5,2%. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 6,8%, sementara terendah pada tahun 2020 sebesar 2,1% akibat dampak pandemi COVID-19. Efektivitas kebijakan fiskal terlihat dari multiplier effect belanja pemerintah yang mencapai 1,42, artinya setiap Rp 1 belanja pemerintah menghasilkan pertumbuhan output sebesar Rp 1,42.

Dampak Alokasi Anggaran terhadap Sektor Ekonomi Unggulan

Analisis sektoral mengungkapkan dampak diferensial alokasi anggaran terhadap berbagai sektor ekonomi. Sektor konstruksi menunjukkan respons tertinggi terhadap belanja modal dengan elastisitas 0,412, mencerminkan karakteristik sektor yang sangat bergantung pada investasi infrastruktur pemerintah. Industri pengolahan menempati posisi kedua dengan elastisitas 0,385, menunjukkan potensi pengembangan sektor manufaktur melalui stimulus fiskal yang tepat sasaran.

Tabel 2. Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan terhadap PDRB (%)

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian	21,4	22,1	21,8	21,5	21,2
Pertambangan	18,7	17,9	18,4	18,9	19,2
Industri Pengolahan	16,2	15,8	16,5	17,1	17,8
Konstruksi	12,4	11,9	12,6	13,2	13,8
Perdagangan	11,8	11,2	11,9	12,4	12,9

Sektor pertanian, meskipun tetap menjadi kontributor utama PDRB dengan rata-rata 21,4% selama periode penelitian, menunjukkan elastisitas yang relatif moderat (0,276) terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian lebih responsif terhadap kebijakan non-fiskal seperti subsidi dan bantuan teknis.

Tabel 3. Elastisitas Pertumbuhan Sektor terhadap Komponen Belanja

Sektor	Belanja Modal	Belanja Infrastruktur	PAD
Pertanian	0,276	0,312	0,184
Pertambangan	0,298	0,278	0,226
Industri Pengolahan	0,385	0,356	0,245
Konstruksi	0,412	0,436	0,268
Perdagangan	0,324	0,298	0,232

Alokasi belanja infrastruktur yang mencapai rata-rata 35,6% dari total belanja modal selama 2019-2023 berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor konstruksi dan industri pengolahan. Temuan ini menekankan pentingnya strategi alokasi anggaran yang mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing sektor ekonomi.

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pemerataan Pembangunan

Analisis ketimpangan wilayah menggunakan Indeks *Williamson* menunjukkan tren penurunan kesenjangan dari 0,412 pada tahun 2019 menjadi 0,364 pada tahun 2023, meski dengan laju yang moderat. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal telah berkontribusi pada upaya pemerataan pembangunan antar wilayah di Kalimantan Tengah.

Tabel 4. Indeks *Williamson* dan Komponen Kebijakan Fiskal per Wilayah

Wilayah	Indeks Williamson	Rasio Belanja Modal/PDRB	Rasio PAD/Total Pendapatan
Kalteng Utara	0,,412	0,186	0,234
Kalteng Tengah	0,385	0,204	0,256
Kalteng Selatan	0,356	0,198	0,242
Palangkaraya	0,298	0,212	0,312

Dekomposisi spasial menunjukkan variasi signifikan dalam efektivitas kebijakan fiskal antar wilayah. Kota Palangkaraya mencatat elastisitas pertumbuhan tertinggi terhadap belanja modal (0,342), sementara kabupaten di Kalimantan Tengah bagian utara menunjukkan respons yang lebih moderat (0,264). Disparitas ini mencerminkan perbedaan kapasitas institusional dan kondisi infrastruktur dasar antar wilayah,

Tabel 5. Trend Ketimpangan Wilayah 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Williamson	0,412	0,398	0,385	0,376	0,364
Rasio PDRB Tertinggi/Terendah	3,24	3,18	3,12	3,05	2,98
Disparitas Pendapatan per Kapita	0,386	0,374	0,368	0,356	0,342

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa daerah dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Koefisien korelasi

antara rasio PAD dan pertumbuhan ekonomi mencapai 0,684 (p < 0,01). mengindikasikan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 6. Distribusi Alokasi Anggaran berdasarkan Wilayah (Miliar Rupiah)

Wilayah	Belanja Modal	Belanja Infrastruktur	Dana Transfer
Kalteng Utara	2,456	865	3,245
Kalteng Tengah	2,876	998	3,678
Kalteng Selatan	2,654	912	3,456
Palangkaraya	3,234	1,234	4,123

Hasil uji kausalitas *Granger* menunjukkan hubungan dua arah antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, dengan F-statistik 8,456 (p < 0,01) untuk pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan, dan F-statistik 6,234 (p < 0,05) untuk arah sebaliknya. Temuan ini mengkonfirmasi peran strategis kebijakan fiskal sebagai instrumen pembangunan ekonomi regional.

Tabel 7. Dekomposisi Varians Pertumbuhan Ekonomi

Komponen	Kontribusi (%)
Belanja Modal	28,4
Belanja Infrastruktur	32,6
PAD	19,8
Dana Transfer	24,5
Faktor Lain	5,7

Implikasi Kebijakan

Temuan empiris penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, Pertama, prioritas alokasi anggaran sebaiknya diarahkan pada belanja infrastruktur yang terbukti memiliki dampak multiplier tertinggi, Kedua, strategi diferensiasi kebijakan fiskal antar wilayah diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas stimulus ekonomi, Ketiga, penguatan kapasitas PAD daerah menjadi kunci *sustainability* pertumbuhan ekonomi jangka panjang,

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah di Kalimantan Tengah, meski dengan efektivitas yang bervariasi antar wilayah dan sektor ekonomi, Optimalisasi kebijakan fiskal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti empiris untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,

Pembahasan

Efektivitas Implementasi Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Hasil analisis mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan fiskal di Kalimantan Tengah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Berdasarkan estimasi model *fixed effect*, ditemukan koefisien elastisitas belanja modal sebesar 0,284 (p < 0,05) yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% belanja modal berkontribusi pada kenaikan PDRB sebesar 0,284%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Acemoglu & Robinson (2019) yang menegaskan pentingnya optimalisasi belanja modal dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akumulasi kapital fisik dan teknologi. Efektivitas kebijakan fiskal tercermin dari multiplier effect belanja pemerintah yang mencapai 1,42, menunjukkan bahwa setiap Rp 1 belanja pemerintah mampu menghasilkan pertumbuhan output sebesar Rp 1,42. Hal ini mengkonfirmasi penelitian Carbaugh (1385) yang menemukan bahwa multiplier effect kebijakan fiskal cenderung lebih tinggi di daerah dengan basis ekonomi yang terdiversifikasi karena adanya *forward* dan *backward linkages* yang lebih kompleks antar sektor ekonomi.

Trend pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah selama periode penelitian menunjukkan pola fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 5,2%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,8%. Hasil uji kausalitas *Granger* dengan *F-statistik* sebesar 8,456 (p < 0,01) mengonfirmasi adanya hubungan dua arah antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Einstein (2020) hubungan kausalitas ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berperan sebagai stimulus pertumbuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi itu sendiri melalui mekanisme *automatic stabilizers* dan *procyclical fiscal behavior.* Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung meningkatkan pengeluaran ketika kondisi ekonomi membaik dan mengurangi belanja saat

menghadapi kontraksi ekonomi, yang secara teoritis dapat memperkuat atau memperlemah siklus bisnis regional.

Elastisitas belanja modal yang relatif moderat (0,284) mengindikasikan bahwa meskipun investasi pemerintah memberikan kontribusi positif, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Rodrik (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas belanja modal sangat bergantung pada kualitas institusi, efisiensi birokrasi, dan kapasitas implementasi proyek infrastruktur. Dalam konteks Kalimantan Tengah, relatif rendahnya elastisitas ini kemungkinan disebabkan oleh *bottleneck* dalam proses pengadaan, koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen proyek pembangunan.

Dampak Alokasi Anggaran terhadap Sektor Ekonomi Unggulan

Analisis sektoral menunjukkan bahwa dampak alokasi anggaran bervariasi secara signifikan di antara sektor-sektor ekonomi unggulan. Sektor konstruksi menunjukkan elastisitas tertinggi terhadap belanja modal (0,412), diikuti oleh industri pengolahan (0,385), dan pertanian (0,276). Menurut Filippetti & Sacchi (2013), responsivitas yang tinggi pada sektor konstruksi umumnya berkaitan dengan sifat sektor ini yang *labor-intensive* dan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat dengan sektor lainnya, menciptakan multiplier effect yang lebih besar dalam perekonomian lokal. Karakteristik sektor konstruksi yang membutuhkan input dari berbagai industri pendukung seperti semen, baja, dan peralatan berat, serta kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadikan sektor ini sebagai *locomotive sector* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Alokasi belanja infrastruktur yang mencapai rata-rata 35,6% dari total belanja modal selama 2019-2023 memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor konstruksi dan industri pengolahan. Hal ini konsisten dengan temuan Stijns (2024) yang mengidentifikasi bahwa investasi infrastruktur memiliki efek multiplier yang lebih besar pada sektor-sektor produktif karena kemampuannya menurunkan biaya transaksi, meningkatkan produktivitas faktor produksi, dan memperluas akses pasar. Infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi berperan sebagai *enabling factor* yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di berbagai sektor, terutama manufaktur dan perdagangan yang sangat bergantung pada konektivitas dan keandalan pasokan utilitas. Sektor pertanian, yang berkontribusi 21,2% terhadap PDRB pada tahun 2023, menunjukkan elastisitas yang lebih moderat terhadap belanja modal (0,276).

Dekomposisi varians pertumbuhan ekonomi mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur memberikan kontribusi terbesar (32,6%), diikuti oleh belanja modal (28,4%), dan dana transfer (24,5%). Dylan Trotsek (2016) menyarankan bahwa proporsi ini mencerminkan pentingnya infrastruktur sebagai *enabler* pertumbuhan sektor produktif, terutama di daerah dengan karakteristik geografis seperti Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah luas dengan tingkat aksesibilitas yang beragam. Investasi infrastruktur rural menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui perbaikan akses ke pasar, teknologi, dan input produksi.

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pemerataan Pembangunan

Analisis ketimpangan wilayah menggunakan Indeks Williamson menunjukkan tren penurunan kesenjangan yang moderat, dari 0,412 pada tahun 2019 menjadi 0,364 pada tahun 2023. Rasio PDRB tertinggi terhadap terendah juga menunjukkan perbaikan, turun dari 3,24 pada tahun 2019 menjadi 2,98 pada tahun 2023. Sesuai dengan penelitian Chairul dkk, (2025), penurunan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, meskipun dengan laju yang relatif lambat. Fenomena ini mencerminkan *nature* dari proses konvergensi ekonomi regional yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai keseimbangan, terutama ketika terdapat perbedaan signifikan dalam *endowment* sumber daya alam, kualitas infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan antar daerah. Dekomposisi spasial mengungkapkan variasi signifikan dalam efektivitas kebijakan fiskal antar wilayah. Kota Palangkaraya mencatat elastisitas pertumbuhan tertinggi terhadap belanja modal (0,342), sementara kabupaten di Kalimantan Tengah bagian utara menunjukkan respons yang lebih moderat (0,264),

Menurut Thomas (2016), perbedaan ini dapat dijelaskan oleh variasi dalam kapasitas absorpsi dan kualitas kelembagaan antar daerah yang mempengaruhi efisiensi transformasi input fiskal menjadi output ekonomi. *Urban areas* seperti Palangkaraya umumnya memiliki keunggulan komparatif dalam hal ketersediaan infrastruktur dasar, kualitas sumber daya manusia, dan akses ke pasar yang lebih baik, sehingga mampu merespons stimulus fiskal dengan lebih efektif. Daerah dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dengan koefisien korelasi mencapai 0,684 ($p < 0,01$).

Temuan ini mendukung argumen Fraschini (2013) bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Kemandirian fiskal yang tinggi tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi daerah yang lebih baik, tetapi juga mengindikasikan adanya insentif yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi

kebijakan, meningkatkan efisiensi pengeluaran, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. *Dependency ratio* yang rendah terhadap transfer fiskal memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merespon dinamika ekonomi lokal dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing wilayah.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal di Kalimantan Tengah periode 2014-2023 menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dibuktikan dengan koefisien elastisitas belanja modal 0,284 dan multiplier effect 1,42. Pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,2% per tahun dengan puncak 6,8% pada 2022. Secara sektoral, konstruksi menunjukkan elastisitas tertinggi (0,412), diikuti industri pengolahan (0,385) dan pertanian (0,276), dengan kontribusi signifikan dari belanja infrastruktur yang mencapai 35,6% dari total belanja modal. Analisis ketimpangan wilayah menunjukkan penurunan Indeks Williamson dari 0,412 (2019) menjadi 0,364 (2023), dengan Kota Palangkaraya memiliki elastisitas pertumbuhan tertinggi (0,342).

Daerah dengan rasio PAD lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan lebih stabil (korelasi 0,684), dan uji kausalitas *Granger* mengkonfirmasi hubungan dua arah antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memperkuat teori ekonomi *Keynesian* mengenai peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Temuan elastisitas belanja modal yang positif dan multiplier effect sebesar 1,42 mengkonfirmasi hipotesis bahwa investasi publik dapat menciptakan efek berganda dalam perekonomian regional. Hubungan kausalitas dua arah antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa teori *endogenous growth* berlaku dalam konteks ekonomi regional, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Penggunaan pendekatan analisis elastisitas sektoral dan uji kausalitas *Granger* dalam konteks ekonomi regional memberikan kontribusi metodologis bagi penelitian serupa. Model yang dikembangkan dapat diadaptasi untuk analisis kebijakan fiskal di provinsi lain dengan karakteristik ekonomi yang serupa, khususnya daerah berbasis sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D., & & Robinson, J. A. (2019). The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty: winners of the 2024 nobel prize in economics. *The Narrow Corridor: How Nations Struggle For Liberty*, *January*, 608. https://books.google.co.tz/books/about/The_Narrow_Corridor.html?id=JxWJDwAAQBAJ&redir_esc=y

Blanchard, O., Leandro, A., & Zettelmeyer, J. (2021). Redesigning EU fiscal rules: From rules to standards. *Economic Policy*, *36*(106), 195–236. https://doi.org/10.1093/epolic/eiab003

Bom, P. R. D., & Ligthart, J. E. (2014). Public infrastructure investment, output dynamics, and balanced budget fiscal rules. *Journal of Economic Dynamics and Control*, *40*, 334–354. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.01.018

Carbaugh, R. J. (1385). *International Economis* (Vol. 17).

Chairul, R. P., Falianty, T. A., Triaswati, N., & Revindo, M. D. (2025). Resource curse or blessing? The role of economic complexity in low- and middle-income countries' industrialization. *Cogent Economics and Finance*, *13*(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2492200

Dylan Trotsek. (2016). Economic Growth and Convergence, Applied Especially To China. *NBER Working Paper Series*, *9*, 1689–1699.

Einstein, A. (2020). *The Science of Macroeconomics*.

Filippetti, A., & Sacchi, A. (2013). Varieties of Decentralization, Institutional Complementarities, and Economic Growth: Evidence in OECD Countries. *SSRN Electronic Journal*, *March*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2291053

Fraschini, A. (2013). *Fiscal Federalism In The Big Developing Countries: China And India*. *February 2006*.

Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2016). Does the Composition of Government Expenditure Matter for Long-Run GDP Levels? *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, *78*(4), 522–547. https://doi.org/10.1111/obes.12121

Haga, R., Nugroho, S., Bancin, J. B., & Christmas, A. F. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Terhadap Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, *1*(4), 127–141. https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.633

Latifah, L. L., & Rosyadi, S. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus

Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(3), 1787–1801. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.799

Risqiyah, W., & Yunani, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *5*(1), 68–80.

Rodrik, D. (2015). *Economics Rules*. https://global.oup.com/academic/product/economics-rules-9780198736899?lang=en%7B&%7Dcc=za

Rodrik, D. (2021). Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism. *Annual Review of Economics*, *13*, 133–170. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-070220-032416

Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, *1*(4), 1–10. https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231

Stijns, J.-P. C. (2024). This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search. *AgEcon Search*, 1–26.

Thomas, A. (2016). Inequality and Globalization. *Republic of Equals*, *56*, 338–367. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190602116.003.0012

Thwaites, J. (2025). *Joseph Stiglitz. People, Power and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent, New York / London, W.W. Norton and Co., 2020, 371p. (LCCN-2019014726; ISBN-9781324004219)*.

Yılmaz, D., & Çetin, I. (2017). *The Impact of Infrastructure on Growth in Developing Countries*. *January*, 40–68. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2361-1.ch003